



KECAK BALI

Keadaan Cakrawala Bali



APBN

SARBAGITA

Triwulan IV Tahun 2024

**Implementasi
Penguatan Peran KPPN
sebagai Financial Advisor
Tahun 2024**

**Program
Magang Reguler
Kementerian Keuangan**

**Langkah-Langkah
Akhir Tahun 2024**



SEKAPUR SIRIH



Buletin KECAK BALI (KEadaan CAKrawala BALI) Volume 1 Tahun 2025 kembali hadir menyajikan informasi seputar APBN dan Transfer ke Daerah yang dilaksanakan oleh KPPN Denpasar sebagai *Treasury Operation* dan *Financial Advisor*.

Beberapa informasi pada Buletin KECAK BALI Volume 1 Tahun 2025 antara lain Implementasi Penguatan Peran KPPN sebagai *Financial Advisor* Tahun 2024, Program Magang Reguler Kementerian Keuangan, dan Langkah-Langkah Akhir Tahun 2024.

Informasi yang disajikan kiranya dapat memberikan pemahaman terhadap kontribusi dan peran KPPN Denpasar dalam mengawal APBN di wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita) dan mewujudkan layanan Perbendaharaan yang cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan tanpa biaya.



Trimo Yulianto

Kepala KPPN Denpasar

DAFTAR ISI

- 4 Realisasi Belanja Wilayah SARBAGITA Triwulan IV Tahun 2024
- 5 Transfer ke Daerah
- 6 Implementasi Penguatan Peran KPPN sebagai *Financial Advisor* Tahun 2024
- 12 PUNAPI APBN
- 14 Kaleidoskop 2024
- 16 Program Magang Reguler Kementerian Keuangan
- 18 Langkah-Langkah Akhir Tahun 2024

Realisasi Belanja Wilayah SARBAGITA Periode Triwulan IV Tahun 2024



HIGHLIGHT 2024

1. Kenaikan Gaji ASN/TNI/Polri

Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2024, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri dan aparat negara serta mendorong motivasi dalam pelaksanaan tugas. KPPN Denpasar selalu memastikan anggaran untuk kenaikan gaji ini disalurkan tepat waktu.

2. Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada

Penyelenggaraan pemilu serentak telah dilaksanakan sesuai PMK 181/PMK.05/2022 pada mitra satker KPPN Denpasar sebanyak 5 KPU dan 3 Bawaslu serta melalui hibah langsung berupa uang berasal dari Pemerintah Daerah.

3. Perubahan Nomenklatur/Administrasi Kementerian/Lembaga sebagai Dampak Pembentukan Kabinet Merah Putih

Pada KPPN Denpasar terdapat 52 satker baru di 8 Kementerian/Lembaga.

4. Penghematan Perjadin

Efisiensi belanja perjadin minimal 50% dari sisa pagu anggaran diakhir tahun anggaran.

Realisasi Transfer ke Daerah Periode Triwulan IV Tahun 2024

A. Dana Transfer Umum

Dana Alokasi Umum (DAU)

Penyaluran hingga akhir Desember ini juga termasuk DAU Tambahan sebagai dukungan pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru ASN di daerah yang gaji pokoknya bersumber dari APBD yang tidak menerima tambahan penghasilan di TA 2024 secara sekaligus dibulan Oktober sejumlah 5M

Pagu	Realisasi
4T	3,9T

Dana Bagi Hasil (DBH)

Padaakhir tahuntelah tersalur DBH Kurang Salur Lebih Salur (KBLB) dan DBH Non Tunai (TDF)

Pagu	Realisasi
407M	407M

B. Dana Transfer Khusus

DAK Fisik

Penyaluran DAK Fisik ini telah mencapai 100% dari kontrak terdaftar yang diajukan setiap pemda di aplikasi OMSPAN TKD

Pagu	Realisasi
254,9 M	224M

Dana BOSP

Pagu	Realisasi
754,9M	746,2M

Dana BOK

Pagu	Realisasi
74,4 M	74,4M

Non Fisik Lainnya

Pagu	Realisasi
47M	47M

C. Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan

Dana Desa

Penyaluran sudah termasuk Insentif Dana Desa sebesar 8,2M untuk 60 desa dengan kinerja terbaik berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja



Pagu	Realisasi
270,7M	270,7M

Insentif Fiskal



Pagu	Realisasi
186M	186M

Implementasi Penguatan Peran KPPN sebagai Financial Advisor Tahun 2024

Trimo Yulianto, Kepala KPPN Denpasar

Dalam rangka transformasi, reformasi, dan digitalisasi pengelolaan perbendaharaan, dilakukan penajaman fungsi dan organisasi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan melaksanakan tugas *Treasury Operation* dan *Financial Advisor*. Pelaksanaan tugas selaku *Financial Advisor* tersebut diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-32/PB/2024 Tentang Program Penguatan Peran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Selaku *Financial Advisor*. Penguatan peran KPPN selaku *Financial Advisor* terdiri dari: a. *Central Government Advisory*, merupakan pelaksanaan *advisory* pengelolaan anggaran satuan kerja (satker) dari sisi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban; b. *Local Government Advisory*, merupakan pelaksanaan *advisory* pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pengelolaan Transfer ke Daerah, pengelolaan APBD, serta sinkronisasi APBN dan APBD; dan c. *Special Mission Advisory*, merupakan pelaksanaan *advisory* dalam mendorong kesuksesan program *Special Mission* yang memiliki jangkauan kewilayahan. Ruang lingkup yang dapat menjadi objek antara lain Investasi Daerah, Pengembangan Kredit Program (pengembangan dan pemberdayaan UMKM), pengelolaan BLU diantaranya implementasi Co-Location BPD LH, pengelolaan BLUD, pelaksanaan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan pelaksanaan *Special Mission* lainnya sesuai dengan arah kebijakan Kementerian Keuangan.

Sepanjang tahun 2024, KPPN Denpasar telah melaksanakan rangkaian tugas selaku *Financial Advisor* tersebut. Frekuensi pelaksanaan kegiatannya bervariasi, mulai dari bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan, maupun yang bersifat insidental.

Bentuk pelaksanaannya juga dilakukan penyesuaian dengan yang telah berlangsung pada tahun sebelumnya dan diadaptasi dengan inovasi yang dimiliki oleh KPPN Denpasar.

A. Central Government Advisory

1. Koordinasi Pelaksanaan Anggaran

Koordinasi pelaksanaan anggaran pada KPPN Denpasar dilaksanakan sepanjang tahun dan pada beberapa tingkatan (manajerial serta teknis). Mengawali tahun Anggaran 2024 dilaksanakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran pada bulan Januari 2024. Kegiatan ini menjadi sarana untuk menyatukan semangat dalam mengawal APBN 2024, agar terwujud belanja pemerintah yang lebih berkualitas (*spending better*) serta dalam rangka mendorong akselerasi transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan tema APBN 2024 yakni Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Dalam kegiatan Rapat Koordinasi tersebut disampaikan evaluasi pelaksanaan anggaran pada satuan kerja dan penyampaian penghargaan terhadap satuan kerja yang mempunyai kinerja terbaik, yang terdiri dari: Capaian Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran Terbaik (Pagu Kecil, Sedang, dan Tinggi), Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, serta Penggunaan Transaksi dengan Kartu Kredit Pemerintah dan Digital Payment.

Agar pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 dapat terlaksana dengan lebih baik lagi, disampaikan penegasan arahan Menteri Keuangan berupa langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2024 yakni: a. Meningkatkan kualitas perencanaan; b. Meningkatkan

kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan; c. Melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek; d. Melaksanakan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa; e. Meningkatkan akurasi dan percepatan penyaluran Dana Bantuan Sosial dan Bantuan Pemerintah; f. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban hibah langsung dalam negeri dalam bentuk uang; g. Memprioritaskan dan mengawal penyelesaian program/kegiatan/proyek yang mendukung pencapaian RPJMN 2020-2024; h. Meningkatkan kualitas belanja dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (*value for money*); dan i. Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengendalian internal.

Selanjutnya dalam rangka untuk menginformasikan perkembangan pelaksanaan anggaran selama Semester I, pada bulan Juli 2024 dilaksanakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Semester II. Pada kegiatan tersebut disampaikan progress pelaksanaan anggaran dan kendala-kendala yang dihadapi oleh satuan kerja. Selain itu juga disampaikan apresiasi terhadap satuan kerja yang mempunyai kinerja terbaik sebagaimana halnya pada Rapat Koordinasi awal tahun anggaran.

Bentuk koordinasi selanjutnya sepanjang tahun anggaran, tersedia dalam forum online yang terbagi pada tingkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan Kerja dan tingkatan teknis/operator. Informasi yang bersifat teknis diinformasikan pada forum online teknis/operator, sedangkan informasi yang sifatnya strategis disampaikan pada forum online Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan Kerja.

2. Layanan Helpdesk

Layanan *Helpdesk* pengelolaan



anggaran kepada satuan kerja/stakeholder dilaksanakan oleh petugas *Customer Service Officer (CSO)* KPPN Denpasar berupa: layanan konsultasi, asistensi, dan pemetaan permasalahan Satker. Layanan tersebut berlangsung setiap hari selama jam kerja. Layanan konsultasi dan asistensi adalah dalam rangka memastikan pelaksanaan anggaran pada satuan kerja dapat terlaksana dengan baik atau kendala yang terjadi segera memperoleh solusi. Penyediaan layanan tersebut dilaksanakan secara tatap muka secara langsung/offline maupun secara tatap muka melalui sarana elektronik/ online. Sarana layanan konsultasi lainnya berupa saluran telpon maupun melalui layanan helpdesk HAI CSO.

Layanan konsultasi secara tatap muka melalui sarana elektronik/ online merupakan inovasi yang dikembangkan oleh KPPN Denpasar dengan nama CUSS ON (*Customer Service Officer Online*). Inovasi tersebut merupakan layanan untuk memudahkan para pengelola perbendaharaan pada Satker dalam memperoleh layanan konsultasi CSO. Para pengelola perbendaharaan tersebut dapat memperoleh layanan dengan berkomunikasi langsung dengan CSO KPPN Denpasar melalui *Microsoft Teams Meeting* yang disediakan selama jam kerja.

3. Sosialisasi Kebijakan dan Bimbingan Teknis

Dalam rangka menyampaikan perkembangan peraturan, tata kelola, persyaratan, dan mekanisme pengelolaan anggaran, KPPN Denpasar melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada satuan kerja. Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan minimal satu kali setiap triwulan, yang dilakukan secara tatap muka/offline maupun secara online/daring. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan secara online/daring dilaksanakan melalui acara yang merupakan salah satu inovasi KPPN Denpasar yakni Podcast SALAK BALI (Sapa Lewat Angkasa).

Kebijakan yang telah disosialisasikan sepanjang tahun 2024 meliputi: a. Pembayaran Tunjangan Hari Raya; b. Perubahan/penyesuaian gaji PNS, TNI, dan POLRI; c. Pembayaran Gaji Bulan Ketigabelas; d. Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran; e. Migrasi CMS BRI ke QLola; f. Platform Pembayaran Pemerintah untuk *Common Expense* (pembayaran Listrik dan telepon); g. Langkah-langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2024.

Sedangkan untuk memberikan pemahaman mengenai pengembangan tata kelola maupun operasional *tools/aplikasi* pengelolaan anggaran, KPPN Denpasar melaksanakan bimbingan teknis. Agar dapat memudahkan mitra kerja yang diundang, pelaksanaan bimbingan teknis dilaksanakan secara tatap muka/offline. Bimbingan teknis

Agar dapat memudahkan mitra kerja yang diundang, pelaksanaan bimbingan teknis dilaksanakan secara tatap muka/offline. Bimbingan teknis yang dilaksanakan pada tahun 2024, meliputi: a. Penggunaan Cash Management System (CMS pada BRI dan BNI Direct pada BNI); b. Aplikasi Digipay I; c. Pengisian Target dan Capaian Output; d. Pengelolaan Dana Pemilu pada Bendahara Pengeluaran Pembantu; e. Implementasi Tanda Tangan Elektronik pada Aplikasi SAKTI.

4. Focus Group Discussion (FGD) Sharing Session

Sebagai upaya untuk lebih memahami permasalahan/kendala yang terjadi pada satuan kerja serta mendiskusikan alternatif penyelesaiannya, KPPN Denpasar setiap bulan melaksanakan FGD/*Sharing Session* dengan mengundang Satuan Kerja terpilih. Pelaksanaan FGD/*Sharing Session* tersebut dikemas dalam kegiatan yang merupakan inovasi KPPN Denpasar yakni Perbincangan Kinerja Stakeholder (PENJOR). Jumlah satuan kerja yang diundang pada kegiatan tersebut bervariasi menyesuaikan tema dan jenis permasalahan yang dihadapi pada satuan kerja.

Tema utama yang paling sering diangkat adalah penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Pertimbangan

pegangangkatan tema ini, karena merupakan alat pengukuran penilaian kinerja satuan kerja yang paling pokok. Satuan Kerja yang mempunyai nilai IKPA relatif rendah akan diundang dalam Penjor, untuk dikonfirmasi permasalahan yang terjadi pada satuan kerja tersebut dan mendiskusikan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mendorong peningkatan nilai IKPA. Selain tema IKPA, tema lain yang diangkat dalam Penjor yakni: a. Pengelolaan dana pemilu (Pemilu legislatif, Pilpres, dan Pilkada); b. Belanja Kontraktual; c. Kontrak yang berpotensi penyelesaiannya menggunakan RPATA.

5. Monitoring dan Evaluasi

Sebagai upaya, tindakan, dan kegiatan untuk mendorong terwujudnya pengelolaan anggaran yang profesional, transparan, dan akuntabel pada satker, KPPN Denpasar melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap Satuan Kerja setiap bulannya. Pemilihan satuan kerja yang dijadikan obyek monev didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut: a. setelah diundang menghadiri kegiatan Penjor atau Bimtek, belum terdapat perbaikan atau peningkatan dalam pengelolaan anggarannya; b. Terdapat isu yang perlu mendapat perhatian, misalnya: Pejabat Perbendaharaan yang belum memiliki sertifikasi pejabat perbendaharaan (PNT, SNT, BNT).

Agar pelaksanaan monev tersebut memperoleh hasil yang optimal, menggunakan alat bantu Kertas Kerja Monev yang terdiri dari kertas kerja mandatory, kertas kerja complementary, dan feedback baik internal maupun eksternal.

Dalam pelaksanaan monev tersebut, diupayakan agar seluruh pejabat perbendaharaan ikut menghadiri. Agar terhadap permasalahan yang timbul atau perlu klarifikasi segera terdapat respon. Sehingga feedback yang diperoleh dari para pihak, dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi pelaksanaan anggaran pada satuan kerja.

6. Publikasi Hasil di Pembangunan Provinsi Bali

Manfaat dari belanja APBN yang telah dilaksanakan oleh Satuan Kerja perlu dipublikasikan untuk menyampaikan pesan kepada Masyarakat bahwa APBN yang dikelola oleh Satuan Kerja memberikan manfaat bagi Masyarakat dalam berbagai bidang, antara lain: bidang infrastruktur, pendidikan, budaya, pariwisata, atau bidang-bidang lainnya. KPPN Denpasar melakukan publikasi tersebut melalui inovasi Punapi 037 (Publikasi APBN dan Pembangunan di Provinsi Bali).

Punapi 037 selama tahun 2024 melakukan liputan dan publikasi terhadap proyek yang didanai dari APBN yang nilainya relatif besar atau menjadi Proyek Strategis Nasional, misalnya: Pembangunan Bendungan Sidan yang berlokasi meliputi 3 kabupaten (Badung, Gianyar, dan Bangli), Pembangunan Embung Tukad Unda yang berlokasi di Kabupaten Klungkung.

B. Local Government Advisory

1. Koordinasi Penyaluran Dana Transfer ke Daerah

Koordinasi penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD) pada KPPN Denpasar dilaksanakan sepanjang tahun dan pada beberapa tingkatan (manajerial serta teknis). Adapun Pemda yang penyalurannya dilaksanakan oleh KPPN Denpasar meliputi Provinsi Bali, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan.

Mengawali tahun Anggaran 2024 dilaksanakan Rapat Koordinasi penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada bulan Januari 2024. Dalam kegiatan Rapat Koordinasi tersebut disampaikan evaluasi penyaluran TKD Tahun Anggaran 2023 dan penyampaian penghargaan terhadap Pemerintah Daerah yang mempunyai kinerja terbaik dalam penyaluran Dana Desa dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Penghargaan diberikan untuk 2 kategori, yakni penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik tersebut yang memerlukan proses verifikasi persyaratan penyaluran oleh KPPN Denpasar. Sedangkan penyaluran Dana TKD lainnya, berdasarkan

rekomendasi dari Kantor Pusat.

Agar penyaluran TKD khususnya Dana Desa dan DAK Fisik pada tahun 2024 dapat tersalurkan dengan lancar, KPPN Denpasar menyampaikan mekanisme penyaluran sesuai dengan ketentuan perubahan terakhir. Kebijakan pada tahun 2024 yakni memperbesar dampak DAK melalui penerapan konsep berbasis pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) dalam rangka pencapaian outcome optimal melalui penguatan alokasi dan penyaluran berbasis kinerja. Karakteristik semua DAK Fisik adalah "DAK Penugasan" dengan target per bidang/subbidang spesifik, lokpri selektif, dan kegiatan focus. Sedangkan untuk penyaluran Dana Desa mengalami perubahan dengan dibedakan menjadi Yang Ditentukan Penggunaannya (*Earmark*) dan Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya (*Non-Earmark*).

Selanjutnya dalam rangka untuk menginformasikan perkembangan penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik, pada bulan Juni 2024 dilaksanakan koordinasi Kembali dengan mengundang BPKAD dan OPD terkait. Pada kegiatan tersebut disampaikan progress penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik serta dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemda. Dalam kesempatan tersebut juga diingatkan batas waktu penyaluran Dana Desa Tahap II dan DAK Fisik Tahap II.

Bentuk koordinasi selanjutnya sepanjang tahun anggaran, tersedia dalam forum online dengan menyertakan seluruh unit terkait lingkup Pemda dalam wilayah penyaluran KPPN Denpasar.

2. Layanan Helpdesk

Layanan Helpdesk penyaluran TKD dilaksanakan oleh Tim Pengelola Penyaluran TKD pada Seksi Bank KPPN Denpasar berupa: layanan konsultasi, asistensi, dan pemetaan permasalahan penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik. Layanan tersebut berlangsung setiap hari selama jam kerja.

3. Sosialisasi Kebijakan dan Bimbingan Teknis

Dalam rangka menyampaikan perkembangan peraturan, tata kelola, persyaratan, dan mekanisme Dana Desa dan DAK Fisik serta memberikan pemahaman mengenai pengembangan tata kelola maupun operasional *tools/aplikasi* OMSPAN TKD, KPPN Denpasar melaksanakan kegiatan sosialisasi maupun bimbingan teknis yang dilaksanakan minimal setiap triwulan.

Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis tersebut dilaksanakan pada masing-masing Pemda agar dapat lebih detil membahas teknis perkembangan penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik.

4. Focus Group Discussion (FGD)/ Sharing Session

Sebagai upaya untuk lebih memahami permasalahan/kendala yang terjadi pada BPKAD, Dinas PMD, APIP Pemda, maupun OPD serta mendiskusikan alternatif penyelesaiannya, KPPN Denpasar melaksanakan FGD/Sharing Session dengan mengangkat permasalahan yang paling sering timbul dalam penyaluran TKD. Pelaksanaan FGD tersebut dilaksanakan baik dengan mengundang pihak Pemda, maupun dilaksanakan di Lokasi Pemda yang bersangkutan.

5. Monitoring dan Evaluasi

Sebagai upaya, tindakan, dan kegiatan untuk mendorong penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik yang optimal, KPPN Denpasar melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pemda setiap triwulan. Pelaksanaan *monev* tersebut agar diperoleh hasil yang optimal, menggunakan alat bantu Kertas Kerja *Monev* yang terdiri dari kertas kerja *mandatory*, kertas kerja *complementary*, dan *feedback* baik internal maupun eksternal. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis atau FGD/Sharing Session.

Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh KPPN Denpasar diarahkan pada penyediaan informasi dan hambatan pelaksanaan penyaluran,

penyediaan data analisis, identifikasi permasalahan, dan rekomendasi atas permasalahan guna dapat menyusun kebijakan selanjutnya yang lebih efektif dan efisien. Hasil pemantauan dan evaluasi penyaluran TKD setiap triwulan dituangkan dalam Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan disampaikan kepada Direktorat Pelaksanaan Anggaran selaku Koordinator KPA Penyaluran TKD.

C. Special Mission

Pelaksanaan tugas bidang *Special Mission Advisory* merupakan penugasan yang relatif baru bagi KPPN, termasuk KPPN Denpasar. Pelaksanaan pada tahun 2024 cakupannya masih terbatas pada Pembinaan BLU dan Pemberdayaan UMKM. Pembinaan BLU, masih merupakan satuan kerja instansi Pemerintah Pusat, dirangkaikan dengan pelaksanaan tugas bidang *Central Government Advisory* Sedangkan pemberdayaan UMKM merupakan lanjutan dan perluasan cakupan dari yang telah dilaksanakan oleh KPPN Denpasar pada tahun-tahun sebelumnya.

1. Profiling UMKM

Kegiatan Profiling UKM oleh KPPN Denpasar dilakukan kepada 2 UKM di Kabupaten Gianyar, yaitu Pengrajin Tenun Ikat Bali-Endek Sri Sedana dan Pembuat Bumbu Rajang Kering Bali Bumba. Profiling yang dilakukan meliputi: Nama Usaha, Nama Pemilik, Jenis Usaha, Alamat Usaha, Nama Produk, Permodalan, Omset rata-rata per bulan, Pemasaran, Legalitas usaha, Mulai Usaha, Pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Klasifikasi UKM, Kendala yang dihadapi, Kebutuhan Pemberdayaan UKM.

Pemilihan UKM yang akan dijadikan sasaran pemberdayaan dengan pertimbangan antara lain: produk yang dihasilkan dapat dipromosikan dalam beragam event/acara, produk yang dihasilkan dapat dipajang pada etalase Pojok UKM baik di KPPN Denpasar maupun unit organisasi lain yang terlibat.

2. Pelaksanaan Pemberdayaan UMKM

Pelaksanaan pemberdayaan diawali dengan pembuatan nota kesepahaman antara KPPN Denpasar dengan UKM sasaran, yang memuat peran KPPN Denpasar yang akan melaksanakan pendampingan usaha dan fasilitasi pembiayaan, dan pihak pelaku UMKM berkomitmen untuk mengembangkan usaha yang telah dijalankannya dan bersedia berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Pemberdayaan UKM KPPN Denpasar.

Bentuk pemberdayaan yang paling sering dilaksanakan yakni mengikutsertakan UKM dalam kegiatan Bazaar dan sejenisnya yang diselenggarakan oleh Kemenkeu Bali maupun kegiatan berskala nasional yang diselenggarakan oleh Ditjen Perbendaharaan maupun Kementerian Keuangan. UKM yang paling sering mengikuti adalah Pengrajin tenun ikat Bali-Endek. Selain itu juga, mengikutkan dalam kegiatan FGD Pemberdayaan UMKM yang diselenggarakan oleh Kemenkeu Satu Bali.

Pemberdayaan melalui pendampingan pembiayaan dilaksanakan kepada UMKM Pembuat Bumbu Rajang Kering Bali-Bumba yang memerlukan tambahan modal untuk pengembangan usaha bumbu Rajang Bali. KPPN Denpasar bersinergi dengan Penyalur Program Kredit Ultra Mikro, KSP Jujur Utama Mandiri (Jumari) yang berlokasi di Gianyar untuk memberikan informasi pembiayaan yang dapat diakses oleh UKM Bumba Bali.

Bentuk pemberdayaan lainnya berupa melakukan pendampingan pencatatan keuangan melalui pengenalan Aplikasi SIAPIK (Sistem Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan). Aplikasi SIAPIK merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Bank Indonesia untuk memudahkan UMKM dalam pencatatan transaksi keuangan usaha dan secara otomatis dapat menghasilkan laporan keuangan secara digital

3. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Monitoring dan evaluasi

dilaksanakan pada bulan Desember 2024 dengan mempedomani Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-112/PB/2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pelaksanaan kegiatan tersebut memperoleh Kesimpulan dari manfaat pelaksanaan pemberdayaan sebagai berikut: terdapat peningkatan omset dengan mengikuti bazaar/pameran dan promosi/pemasaran secara online, dapat mengakses pembiayaan melalui Lembaga formal, dapat memisahkan rekening pribadi dan rekening usaha, serta dapat melakukan pembukuan dan laporan keuangan sederhana melalui aplikasi SIAPIK.

Penguatan peran KPPN selaku Financial Advisor sejalan dengan perkembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DJPb, serta harapan dari Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, serta Direktur Jenderal Perbendaharaan agar Ditjen Perbendaharaan tidak hanya menjadi pengelola perbendaharaan yang tradisional, namun juga dapat menganalisis keuangan negara dan mampu berperan sebagai intellectual fiscal leader, Regional Chief Economist, sekaligus Financial Advisor. Penguatan peran tersebut diharapkan dapat mengakselerasi shifting pelaksanaan tugas DJPb sebagai analis dan advisor pengelolaan keuangan di daerah.

Penguatan peran KPPN selaku Financial Advisor yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-32/PB/2024, masih terdapat ruang untuk diintegrasikan dengan inisiatif-inisiatif transformasi dan penguatan peran KPPN yang telah berlangsung selama ini. Dengan demikian, penguatan peran tersebut dapat berlangsung dengan dinamis namun masih sesuai dengan koridor dan tujuan yang hendak dicapai.



Bentuk pelaksanaannya juga dilakukan penyesuaian dengan yang telah berlangsung pada tahun sebelumnya dan diadaptasi dengan inovasi yang dimiliki oleh KPPN Denpasar



UKM Endek Sri Sedana



UKM Bumba Bali



FGD Penyaluran dan Rekonsiliasi Sisa DAK Fisik



Podcast Salak Bali



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



DJPb
Indonesian Treasury



INDONESIAN
TREASURY

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DENPASAR



DUKUNG KPPN DENPASAR UNTUK TERUS MENJAGA KEBERLANJUTAN PREDIKAT ZONA INTEGRITAS WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DAN ISO 37001:2016 SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)

**SELURUH LAYANAN KPPN DENPASAR
TIDAK DIPUNGUT BIAYA
"TOLAK DAN LAPOR GRATIFIKASI"**

Layanan Pengaduan



wise.kemenkeu.go.id



pengaduandjpb.kemenkeu.go.id



lapor.go.id



08113999037



email : kepatuhan.internal037@gmail.com



<https://bit.ly/ORAHIN037>

djpb.kemenkeu.go.id/kppn/denpasar/id/



UMKM

MACOONG WOODCRAFT

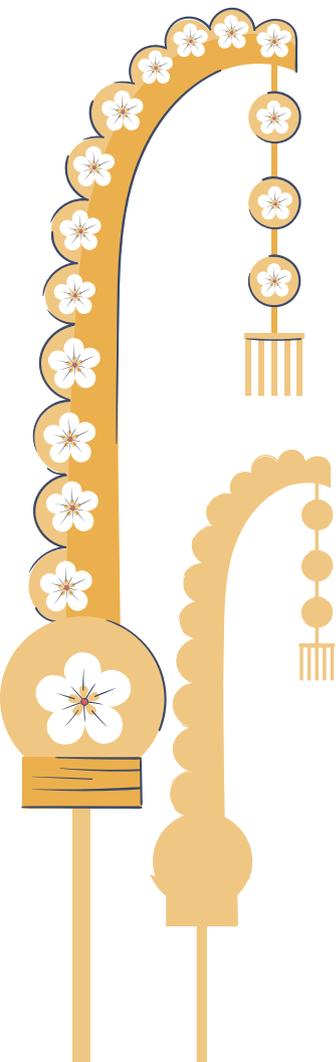
Di tengah perkembangan pesat industri kreatif, Macong Woodcraft merupakan salah satu UMKM yang bergerak dibidang pengrajin ukiran kayu. Keahlian tangan yang terampil berasal dari warisan turun menurun menghasilkan sebuah karya seni yang memancarkan dedikasi dan kecintaan terhadap seni ukir.

Ciri khas dari Macong Woodcraft terletak pada pahatan anatomi dengan detail yang cukup rumit hingga membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk diselesaikan.

Berkat dukungan melalui pembiayaan UMi yang disalurkan oleh Koperasi Jujur Utama Mandiri, mampu memberikan kesempatan bagi pengrajin untuk meningkatkan kualitas bahan baku dan proses produksi untuk menghadirkan inovasi baru yang diciptakan.



PUN AP



#UangKitaUntukApa

BENDUNGAN SIDAN

Bendungan Sidan merupakan proyek satuan kerja SNVT Pembangunan Bendungan BWS Bali-Penida yang didanai #UangKita dengan total nominal Rp 1,5 triliun. Pembangunan Bendungan Sidan memberikan manfaat bagi konservasi air, pariwisata, dan yang paling utama adalah penyediaan air baku sebesar 1,75 m³/detik.

Bendungan yang berada diantara 3 lokasi yaitu Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Bangli serta merupakan kontrak jamak yang dimulai dari tahun 2018 dan berakhir di tahun 2024.



API BN



#UangKitaUntukApa

EMBUNG TUKAD UNDA

Sistem Penyediaan Air Embung Tukad Unda dibangun untuk memenuhi kebutuhan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) dan untuk suplai kebutuhan air bersih di wilayah Klungkung dan Gianyar. Embung ini dibangun di lahan dengan luas sekitar 6 hektar dengan daya tampung air sekitar 143 meter kubik. Selain untuk air bersih, embung ini juga dimanfaatkan untuk irigasi bagi masyarakat dengan harapan dapat mendorong penghijauan di wilayah sekitar bagi masyarakat sekitar.

Embung Tukad Unda merupakan proyek satuan kerja Balai Wilayah Sungai Bali-Penida yang didanai #UangKita dengan total nominal Rp 34,8 Miliar. Pembangunan ini dilaksanakan dua tahap, pertama pembangunan embung dan tahap kedua adalah instalasi perpipaan.





3 Januari 2024 - FGD Persiapan Pelaksanaan Anggaran Pemilu Tahun 2024

Diskusi interaktif antara KPPN dengan KPU & Bawaslu di wilayah kerja KPPN Denpasar difokuskan untuk menindaklanjuti kendala selama pelaksanaan anggaran dan pemilihan solusi tepat sasaran agar pelaksanaan pemilu yang merupakan hajat nasional dapat berjalan lancar



26 Februari 2024 - Rekonsiliasi Pajak Pusat atas Belanja Daerah

Penyusunan rekonsiliasi ini dihasilkan dari pengujian dokumen sumber (NTPN dan Kode Billing) yang telah dipungut oleh bendahara masing-masing kantor pemerintah daerah dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dan KPPN di wilayah setempat



1 Maret 2024 - Sosialisasi Roll Out Penyampaian dan Validasi LPJ melalui SAKTI

Acara ini mengundang bendahara pengeluaran dari 113 satker mitra KPPN Denpasar. Adanya roll out ini mewajibkan seluruh satker untuk menyampaikan LPJ bendahara pengeluaran melalui SAKTI (tidak lagi melalui SPRINT) mulai periode Februari 2024



26 April 2024 - Bimbingan Teknis Perekaman Realisasi Capaian Output



6 Agustus 2024 - FGD Forum Konsultasi Stakeholder

Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan Publik dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik yang melibatkan seluruh penerima layanan



30 Juli 2024 - Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2024 dan Rapor

Kegiatan ini diharapkan dapat membangun koordinasi dan sinergi yang semakin baik untuk menyelesaikan sisa tahun anggaran 2024



1 Mei 2024 - Community of Practice Financial Advisor-Alumni PKN STAN (CoP FA-Alumni PKN STAN)

SKOP 2024



Publik melalui pengembangan Standar Pelayanan di lingkungan KPPN Denpasar
Pelayanan/manfaat/stakeholders



Peringkat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Semester II 2024
Peningkatan kuat dalam mengupayakan pelaksanaan anggaran yang berkualitas selama



25 Juni 2024 - Sosialisasi Penyaluran Gaji Pegawai melalui Bank Penyalur Gaji



19 September 2024 - FGD Persiapan Pelaksanaan Anggaran Pemilu Tahun 2024
Kegiatan yang dihadiri oleh Bendahara pada satuan kerja di wilayah kerja KPPN Denpasar juga bermaksud melakukan konfirmasi pada BRI dan BNI terkait progress permohonan aktivasi CMS yang sudah diajukan satuan kerja



11 Oktober 2024 - Sosialisasi Rekonsiliasi & Penyusunan Laporan Keuangan
Dalam sesi diskusi, para satker secara aktif menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian rekon eksternal periode September 2024



1 November 2024 - Peringatan HORI ke-79 Perwakilan Kemenkeu Bali
Puncak Hari Oeang (HORI) ke-78, tugas Kemenkeu tidak hanya memastikan fiskal negara tetap sehat, tetapi juga terus mendorong transformasi berkelanjutan yang berakar pada semangat untuk memberikan pelayanan yang tulus bagi seluruh rakyat



19 Desember 2024 - Perbincangan Stakeholder (PENJOR)
Kegiatan ini membahas mengenai monitoring penyampaian SPM Penampungan RPATA, permasalahan satker atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran dan Press Release APBN

Program Magang Reguler Kementerian Keuangan Tahun 2024

Trimo Yulianto, Kepala KPPN Denpasar

Dalam rangka menjembatani kebutuhan informasi, pengembangan kompetensi, pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dalam jangka pendek, serta menularkan hal positif yang dimiliki Kementerian Keuangan kepada para mahasiswa ataupun sebaliknya, sekaligus meningkatkan sinergi dengan perguruan tinggi pelaksanaan program magang mahasiswa di lingkungan Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan menyelenggarakan Program Magang Kementerian Keuangan.

Program Magang Kementerian Keuangan terdiri dari 3 (tiga) jenis magang, yaitu: 1. Magang Reguler, program magang yang dilakukan melalui aplikasi magang pada situs <https://magang.kemenkeu.go.id>, dengan lokasi pelaksanaan magang tersebar di seluruh unit Kementerian Keuangan yang terdiri dari 4 (empat) periode pelaksanaan magang, dengan durasi 2 bulan s.d. 6 bulan; 2. Magang Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), program magang yang dilakukan melalui PIC perguruan tinggi yang memiliki MoU dengan Kementerian Keuangan, dengan Lokasi pelaksanaan magang terbatas pada unit kerja Kementerian Keuangan di wilayah Jabodetabek, dengan waktu pelaksanaan magang pada bulan Februari s.d. Juni 2024;

3. Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB), program magang yang dilakukan melalui situs MSIB yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), dengan peserta magang berasal dari hasil seleksi oleh PIC MSIB Kementerian Keuangan yang bersifat tematik, dengan waktu pelaksanaan ditentukan oleh tim MSIB Kemendikbudristek yang dilaksanakan di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Keuangan.

Pelaksanaan Program Magang (Reguler) di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, termasuk di KPPN Denpasar, dilakukan dengan memperhatikan kualifikasi persyaratan mahasiswa magang yang diterima dapat membantu tugas dan fungsi, serta isu strategis Ditjen Perbendaharaan sebagai *Treasury Operation, Financial Advisory, dan Regional Chief Economist*, dengan rekomendasi pilihan jurusan rumpun pendidikan mahasiswa yang relevan.

Persiapan yang dilakukan oleh KPPN Denpasar pada awal tahun dengan menyampaikan data dan informasi kebutuhan magang mahasiswa di KPPN Denpasar, yang meliputi: kualifikasi pendidikan, penugasan magang, unit penempatan, periode waktu magang yang diusulkan, serta

penanggung jawab/PIC magang.

Sedangkan bagi mahasiswa yang akan mengikuti Program Magang Reguler Kementerian Keuangan, persiapannya adalah melakukan pendaftaran magang dengan tahapan sebagai berikut: 1. Registrasi dan Login, yakni registrasi akun dan login untuk menambah data usulan magang; 2. Melengkapi Data data Profil Mahasiswa, Periode Magang; 3. Unggah berkas Persyaratan, seperti: Surat Pengantar, Proposal Magang, Transkrip Nilai, dan Pas Photo; 4. Tambah Usulan Tempat Magang yakni unit kerja yang akan digunakan sebagai tempat magang; 5. Kirim Data, setelah terlebih dahulu memastikan data diisi dengan baik dan benar.

Mahasiswa yang melaksanakan magang di KPPN Denpasar pada Tahun 2024 berasal dari 3 perguruan tinggi dengan rincian sebagai berikut: 1. Mahasiswa Politeknik Negeri Jember sebanyak 3 orang yang melaksanakan magang selama 4 bulan pada bulan September-Desember 2024; 2. Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur sebanyak 1 orang yang melaksanakan magang selama 2 bulan pada bulan September-Oktober 2024; 3. Mahasiswa Universitas Pendidikan Nasional Denpasar sebanyak 1 orang



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

LINI MASA MAGANG

PENDAFTARAN

1 s.d. 31 Oktober 2024

Peserta magang mendaftar dan mengunggah dokumen pada web magang.kemenkeu.go.id.

SELEKSI

1 s.d. 24 November 2024

Unit magang melakukan verifikasi dan seleksi calon peserta magang.

yang melaksanakan magang selama 2 bulan pada bulan September-Oktober 2024; 3. Mahasiswa Universitas Pendidikan Nasional Denpasar sebanyak 1 orang yang melaksanakan magang selama 2 bulan pada bulan Desember 2024 – Januari 2025.

Selama melaksanakan magang, para mahasiswa tersebut disebar pada masing-masing subbagian/seksi dan dilakukan perputaran setiap 2 minggu/ 1 bulan sesuai kebutuhan. Sesuai dengan tujuan program magang, para mahasiswa diminta membantu pelaksanaan tugas pada subbagian/seksi, baik yang sifatnya teknis maupun administratif, di dalam kantor maupun di luar kantor.

Pada kesempatan membantu pelaksanaan tugas tersebut, para mahasiswa sekaligus menetapkan tema penugasan yang akan dijadikan Laporan Magang. Setiap bulan dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan magang yang dituangkan dalam lembar evaluasi yang dilakukan oleh Pegawai Subbagian Umum yang ditunjuk sebagai pengampu.

Selanjutnya pada akhir periode magang, para mahasiswa mempresentasikan Laporan Magang yang telah disusun. Dalam presentasi tersebut dapat dievaluasi Tingkat pemahaman mahasiswa magang, baik terhadap isi Laporan Magang dan pemahaman tugas lainnya di KPPN. Selain itu juga dilakukan reviu dan evaluasi, dalam hal terdapat isi laporan yang perlu dilakukan penyesuaian. Sebagai bukti pelaksanaan magang, diterbitkan Sertifikat Magang oleh KPPN Denpasar.

Program Magang tersebut dirasakan manfaatnya bagi kedua belah pihak, mahasiswa magang dan KPPN Denpasar. Para mahasiswa magang memperoleh pengalaman dan pengetahuan pada dunia kerja, yang kemungkinan besar belum pernah dialami sebelumnya. Sedangkan bagi KPPN Denpasar, dengan adanya magang mahasiswa tersebut sangat membantu dalam pelaksanaan tugas, khususnya pada bulan November-Desember 2024, yang kesibukan KPPN Denpasar meningkat sangat signifikan dalam rangka penyelesaian proses pencairan dana pada akhir tahun anggaran.

“ Para mahasiswa disebar pada masing-masing subbagian/seksi dan dilakukan perputaran setiap 2 minggu/ 1 bulan sesuai kebutuhan ”



Mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur



Mahasiswa Politeknik Negeri Jember

ANG PERIODE 4

PENGUMUMAN

25 November 2024

Calon peserta magang dapat mengakses hasil seleksi pada web magang.kemenkeu.go.id atau email masing-masing.

PELAKSANAAN MAGANG

1 s.d. 31 Desember 2024

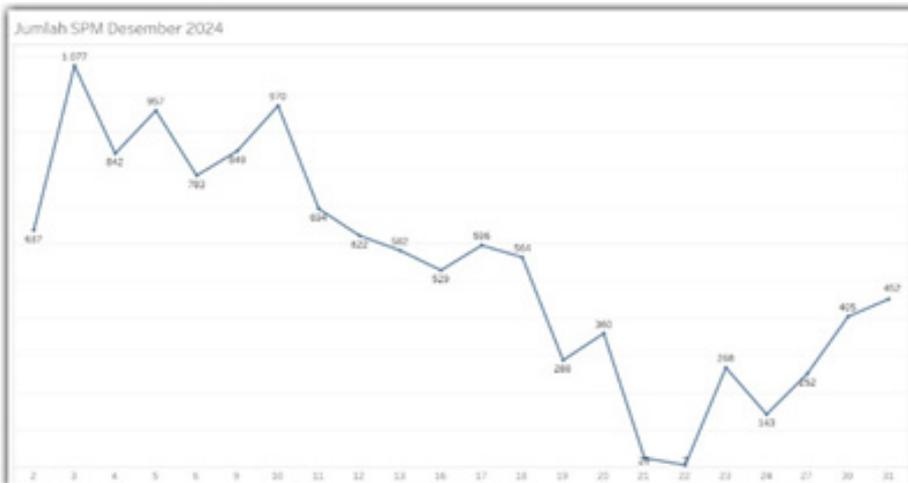
Peserta magang memulai magang pada waktu dan tempat sesuai dengan pengumuman

Ada Apa dengan LLAT 2024

Intan Radha Habsyah, Pelaksana Seksi Pencairan Dana

Happy New Year Semeton!!!
Hallo 2025 <3... Sebelum tahun berganti, seluruh kewajiban yang berada pada tahun 2024 harus segera diselesaikan, tidak terkecuali untuk seluruh realisasi pada tahun anggaran 2024 harus dioptimalkan agar mendapat nilai IKPA yang maksimal. Sudah terbayang belum seberapa banyak SPM yang akan diproses oleh KPPN Denpasar selama periode akhir tahun 2024 ini ya? Mengingat akhir tahun 2023 puncak SPM yang diterima oleh KPPN Denpasar lebih dari 1000 SPM dan kerja overtime demi ketepatan waktu realisasi #Uangkita.

Berbeda dengan tahun 2023 yang diwarnai dengan seringnya sistem mengalami Maintenance. Pada tahun 2024 dengan performa sistem yang lebih baik, proses SPM dapat dilakukan lebih cepat sehingga pulang tidak terlalu larut malam. Berdasarkan data yang telah diolah pada tahun 2024 puncak gelombang SPM terjadi pada hari Selasa, 3 Desember 2024 dengan total SPM yang diterima oleh KPPN Denpasar sebanyak 1077 SPM.



Sama dengan tahun sebelumnya, tahun 2024 juga masih tetap menerapkan RPATA untuk penyelesaian pekerjaan dengan mekanisme kontraktual yang dimulai untuk kontrak yang memiliki tanggal BASPP/ BAST mulai dari 23 Desember 2024. Secara umum RPATA tahun ini sama dengan tahun

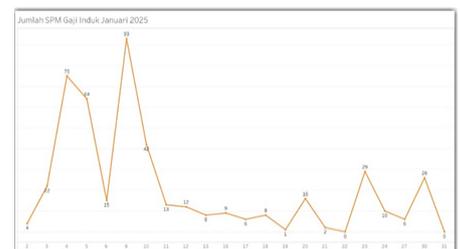
sebelumnya kecuali untuk nilai kontrak dibawah dan/ atau sampai dengan Rp50.000.000,00 yang pada tahun 2023 tidak mengikuti mekanisme RPATA namun pada tahun 2024 seluruh kontrak baik yang bernilai kurang dari atau sama dengan Rp50.000.000,00 wajib melakukan pembayaran dengan mekanisme RPATA. Pengajuan SPM RPATA diawali dengan pengajuan SPM Penampungan RPATA yang diajukan ke KPPN paling cepat tanggal 21 Desember sampai dengan tanggal 23 Desember 2024. Kemudian dilanjutkan dengan SPM Pembayaran RPATA atas pekerjaan yang telah diselesaikan dan/atau progres penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Lantas bagaimana jika pekerjaan belum selesai hingga tanggal 31 Desember 2024?

Untuk pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan hingga tanggal 31 Desember 2024 terdapat dua

mekanisme yaitu satuan kerja diberi kesempatan untuk menyelesaikannya selama 90 hari atau satuan kerja tidak diberi kesempatan untuk menyelesaikannya sehingga pekerjaan hanya dibayarkan sesuai progress penyelesaian sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Terdapat 15 kontrak dari 9 satuan

“ Selama proses transisi kabinet merah putih terdapat beberapa satuan kerja mengalami perubahan nomenklatur dan/ atau administrasi ”



kerja pada KPPN Denpasar yang belum dapat menyelesaikan progress pekerjaannya hingga 31 Desember 2024 dan diberikan kesempatan perpanjangan untuk menyelesaikan pekerjaannya.

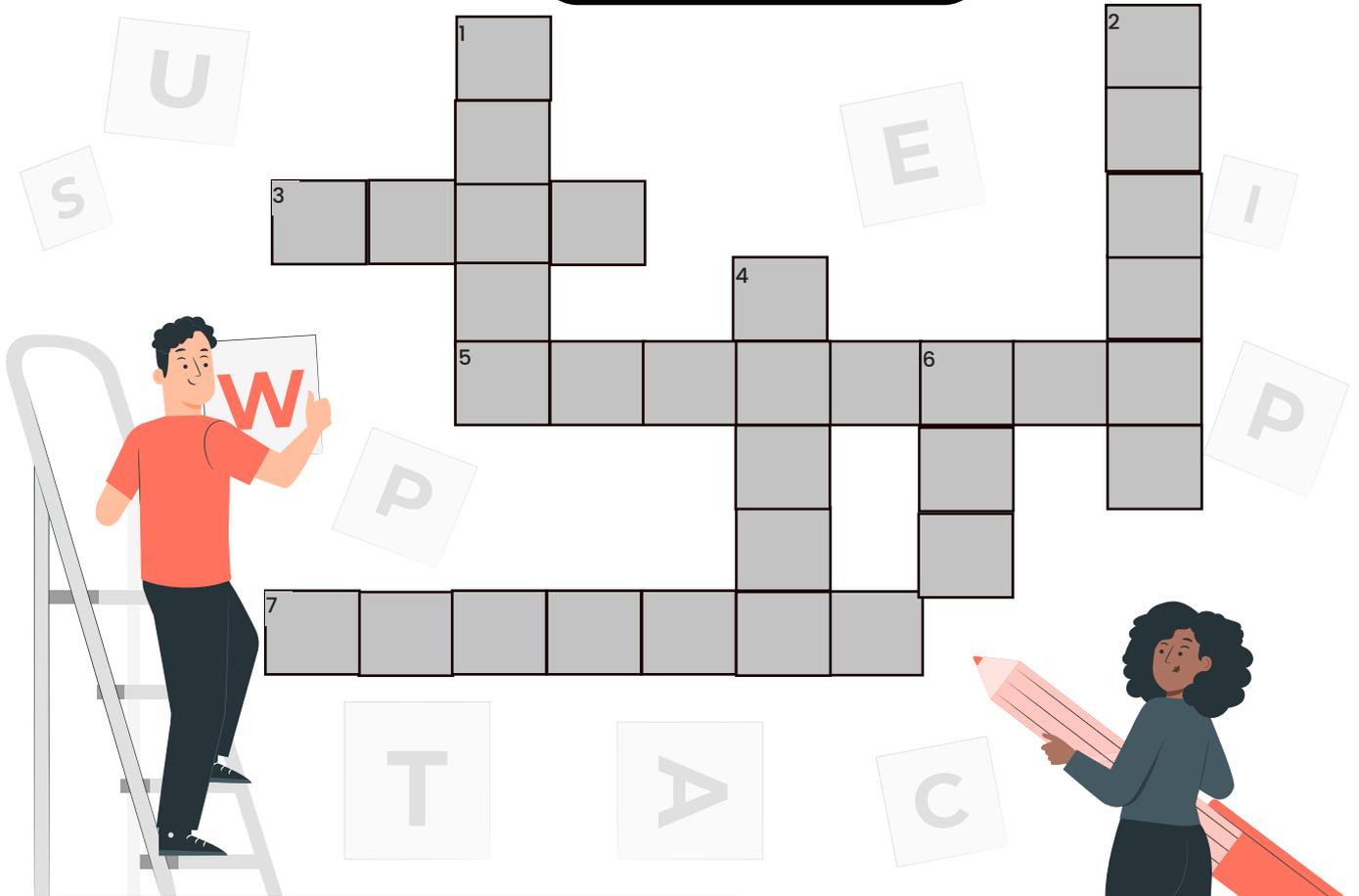
Pembayaran gaji harus tepat waktu ya!!! Berapa satker yang belum mengajukan SPM Gaji Induk Januari 2025? KPPN Denpasar selalu mengupayakan untuk pembayaran gaji tepat waktu. Selama proses transisi kabinet merah putih ini terdapat beberapa satuan kerja mengalami perubahan nomenklatur dan/ atau administrasi. Hal ini juga berdampak pada proses pengajuan SPM gaji induk Januari 2025. Terdapat 52 satuan kerja pada KPPN Denpasar yang mengalami perubahan kode satker. Selain itu, batas pengajuan SPM Gaji Induk Januari 2025 juga mengalami beberapa kali perpanjangan yang awalnya tanggal 6 Januari 2025 kemudian diperpanjang beberapa kali hingga tanggal 31 Desember 2024. Puncak SPM Gaji Induk Januari 2025 terjadi pada hari Selasa, 9 Desember 2024 dengan total SPM masuk sebanyak 93 SPM. Meskipun ada beberapa dinamika perubahan, pembayaran gaji mitra satuan kerja KPPN Denpasar dapat dibayarkan tepat waktu pada 1 Januari 2025.

TEKA-TEKI SILANG



SELAMAT
KEPADA PEMENANG
KECAK BALI VOL.4/2024

Kak Anisa
anisarac1003@gmail.com



Mendatar

3. Selisih DBH dihitung dan diterima pemda (dalam singkatan)
5. Salah satu nilai BerAKHLAK ASN yang dapat diwujudkan dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri secara terus-menerus.
7. Pelaksanaan Financial Advisory yang objeknya antara lain investasi daerah, pemberdayaan UMKM, pengelolaan BLU/BLUD merupakan ... *Mission Advisory*.

Menurun

1. Inovasi KPPN Denpasar berupa berupa video/siaran langsung edukasi dan informasi perbendaharaan yang dikemas secara menarik melalui media Zoom dan Live Youtube adalah ... BALI.
2. Program Kemenkeu untuk menularkan hal positif kepada mahasiswa dan meningkatkan sinergi dengan perguruan tinggi.
4. Rekening untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahkan antara batas akhir pengajuan kepada negara dalam hal ini KPPN sampai dengan 31 Desember Tahun Berkenaan.
6. DBH Non Tunai merupakan penyaluran DBH kepada daerah yang dilakukan secara tidak tunai, melalui rekening ... (dalam singkatan).

Syarat dan Ketentuan

1. Kirim jawaban Anda berupa foto halaman Kuis Cari Kata ke alamat email kecakbali.037@gmail.com dengan subyek LOMBATTSKECAK Vol. 1/2025.
2. Jawaban disertai data diri berupa nama, nomor telepon, alamat dan email.
3. Jawaban paling lambat diterima pada pukul 23.59 WIB Tanggal 31 Maret 2025.
4. Nama pemenang akan diumumkan pada Majalah Kecak Bali edisi berikutnya.
5. Hadiah dikirim ke alamat pemenang sesuai alamat yang diberikan dan konfirmasi melalui telepon.



Trimo Yulianto
Penanggung Jawab



Totok Iman Santoso
Pimpinan Redaksi



Made Pradnyaniti
Kontributor



Nadhelia Sesar Tasya S.
Kontributor



Embun Nurani Wulandari
Layout dan Desain



Devika Yulan Saputri
Kontributor

MEET THE TEAM



Untes Amalia Cahyani
Kontributor



Aveda Astyayustina
Kontributor



Galuh Ajeng Aulia Putri
Kontributor



Adella Gysta Aviera Putri
Kontributor



Intan Radha Habsyiah
Kontributor

**Kecak
Bali
Vol.
1/2025**